

Forum Freedom, 18 Juni 2007

Tema : Korupsi dan Pentingnya Insentif

Narasumber : Chatib Basri (CB)

Hamid Basyaib (HB):

Halo. Selamat pagi saudara-saudara. Anda bersama saya, Hamid Basyaib, dalam acara Forum Freedom, sebuah acara yang disponsori oleh Freedom Institute bekerja sama dengan Kantor Berita Radio 68 H dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia.

Tamu saya pagi ini adalah Dr. Chatib Basri (Dede). Selamat pagi Bung Dede.

CB:

Selamat pagi Hamid.

HB:

Dia adalah direktur LPEM-UI, Fakultas Ekonomi. Tema kita kali ini adalah Korupsi dan Pentingnya Insentif.

Latar belakangnya adalah bahwa Insentif ini dalam kehidupan dianggap sebagai kekuatan pendorong. Orang biasanya melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena insentif.

Orang tidak bisa disebut culas atau curang hanya karena dia mengharapkan insentif. Dan ini terjadi sebenarnya bukan hanya di bidang ekonomi. Orang beragama pun sebenarnya mengharapkan insentif, misalnya masuk surga, dsb.

Nah, yang menarik adalah: dalam politik, terkait dengan korupsi, sejauh ini sepertinya melakukan korupsi itu lebih besar insentifnya ketimbang tidak melakukan. Kalau saya melakukan korupsi, saya sudah pasti mendapatkan uang besar sekali, dan kemungkinan diketahui aparat hukum sangat kecil.

Nah, sekarang pertanyaannya, terkait dengan temuan Transparency International dan Global Corruption Barometer yang menggolongkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Hampir 10 tahun terakhir kita selalu berada dalam peringkat paling bawah.

Menurut anda mengapa korupsi di Indonesia ini begitu persisten, begitu tersebar luas dan sulit diberantas.

CB:

Ini sesuatu yang sangat menarik, Bung Hamid. Saya pinjam logika anda. Saya setuju sepenuhnya dengan itu.

Kalau Transparency International menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling korup di dunia, sebenarnya tidak ada sesuatu yang aneh dengan itu. Karena dari struktur insentif-disinsentif di negeri ini, secara rasional orang harus korup. Kenapa orang harus korup.

HB:

Maksud anda misalnya pegawai negeri?

CB:

Bukan hanya pegawai negeri. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa pun. Kenapa orang harus korup? Kalau dia melakukan tindakan korupsi, manfaatnya itu besar, misalnya ia dapat uang yang sangat banyak, sementara cost-nya, biayanya, itu kecil. Kenapa? Karena penegakan hukum di sini itu hampir tidak ada.

Nah, secara rasional orang akan menjadi korup kalau benefitnya itu lebih besar dibanding cost-nya. Sehingga agak aneh di Indonesia kalau orang itu tidak korup dalam sistem seperti ini.

Karena itu saya tidak sepakat dengan pandangan banyak teman yang melihat korupsi sebagai faktor budaya, atau moral. Atau orang bilang bahwa ini merupakan bagian dari kebudayaan Jawa. Kalau ini betul, bagaimana kita menjelaskan bahwa pola korupsi yang sama terjadi di Cina, Amerika Latin, dan Afrika. Kecuali jika anda bilang bahwa kebudayaan Jawa memengaruhi kebudayaan Cina, dsb.

Atau orang bicara soal moral, bagaimana anda menjelaskan bahwa di negara lain yang agnostik dan kurang beragama, tingkat korupsinya itu rendah. Tidak ada urusannya dengan hal-hal itu. Ini lebih terkait dengan soal insentif dan disinsentif.

Jadi, bagaimana cara mengatasinya, ini harus terkait dengan hal itu. Ada 2 kemungkinan untuk hal ini. Satu, anda bikin cost-nya atau biayanya jadi lebih mahal. Artinya, law enforcement, monitoringnya diperketat sehingga orang takut. Ini kemungkinan pertama. Ini ada biayanya karena harus membikin tim tertentu seperti KPK, dsb.

HB:

Sistem ya.

CB:

Ya, sistem. Ini bisa mahal. Kemungkinan kedua adalah anda hilangkan benefitnya. Kalau orang tidak mendapatkan keuntungan dari korupsi, karena misalnya tidak ada peraturan yang bisa dia jual, tidak ada lisensi yang dia kasih, apa yang kemudian mau dia korup.

Nah, cara yang murah, dan mudah, adalah yang kedua.

HB:

Tapi itu kan susah, Dede. Bagaimana itu dilakukan.

CB:

Yang bisa dilakukan adalah menurunkan sebanyak mungkin peran negara dalam keputusan untuk publik. Misalnya, anda mau buka usaha, anda butuh izin 20 meja. Kalau peraturannya anda buang maka tidak ada yang bisa dijual.

HB:

Katakanlah jadi 4. Korupsi tidak dengan sendirinya hilang, tapi berkurang.

CB:

Dengan sendirinya peluang untung melakukan korupsi menjadi lebih kecil. Itu sebabnya saya percaya, solusi terbaik untuk mengatasi ini adalah solusi pasar.

HB:

Solusi pertama, *law enforcement* dan monitoring itu bagaimana? Maksud anda bisa dicoba?

CB:

Ya, bisa dicoba. Tapi waktunya akan panjang dan mahal. Karena begini. Kalau Anda membentuk KPK dan sebagainya itu baik sekali. Butuh waktu panjang dan gajinya harus cukup baik.

Pilihan lain pernah dilakukan pemerintah tahun 1985 ketika Bea Cukai itu dirumahkan. Dengan sendirinya anda tidak bicara lagi tentang korupsi dari bea cukai. *Wong* Bea Cukainya tidak eksis. Itu bisa dilakukan waktu itu karena implikasinya tidak

besar dalam sistem otoritarianisme. Sekarang mungkin tidak bisa. Ini adalah contoh menghilangkan sisi manfaat dari korupsi.

HB:

Saya setuju bahwa kita dari sisi moral dan budaya tidak lebih baik atau lebih buruk dibanding negara lain.

Tapi kalau kita lihat, tentang KPK, kita tiap hari dijejali berita tentang si A yang ditangkap, dan si B yang diperiksa, saya sebagai warga negara berpikir sampai kapan ini akan seperti ini. Jumlahnya beribu-ribu, dan dapat dipastikan terjadi tebang pilih. Belum lagi soal biaya, biayanya bisa jadi mahal sekali.

CB:

Karena itu saya melihat dua sisi yang harus dilakukan. Anda tidak bisa hanya menghilangkan regulasinya.

Tapi ada satu hal, ini mungkin tidak populer, orang tidak suka mendengar ini. Kita juga mesti hitung bahwa jika anda menghilangkan semua korupsi, itu butuh biaya yang sangat besar, dan bandingkan dengan manfaatnya jika korupsi ini hilang. Sangat mungkin jika anda hitung biayanya lebih besar dari uang yang dikorup itu.

HB:

Korupsi lebih murah.

CB:

Ya. Sehingga ada titik optimum korupsi yang mau tidak mau harus anda toleransi. Ini saya tidak membela korupsi. Namun dari segi biaya mungkin bisa jadi jauh lebih murah.

Contoh yang paling gampang. Anda ditangkap polisi. Anda cenderung tidak membawa ke pengadilan.

HB:

Damai saja, ya.

CB:

Ya. Karena secara logika ini cenderung lebih efisien dan murah. Ada level-level tertentu

yang tidak bisa kita hindari. Jadi jangan beranggapan semua isu ini akan hilang. Ada tingkat optimum yang anda harus toleransi. Tingkat optimum ini yang semakin lama harus dibuat semakin kecil.

HB:

Apakah lembaga anda, LPEM-UI, pernah tidak melakukan studi mendalam tentang bentuk-bentuk korupsi yang bisa ditoleransi. Ada tidak studi yang mendalam tentang masalah itu.

CB:

Secara empiris tidak ada. Tapi logikanya begini, Bung Hamid. Saya kasih contoh. Anda kan sering traveling. Jadi anda butuh pasport. Kalau waktunya sedikit, itu pasport selesai biayanya 500 ribu. Kalau anda punya waktu lebih panjang, 150 ribu sampai sore. Kalau anda punya banyak waktu luang, biayanya 50 ribu, tapi waktu tidak ditentukan. Anda bisa memilih.

Ini sebenarnya pola-pola. Saya tidak menganjurkan untuk diterapkan. Tapi saya mau bilang bahwa pola seperti itu sebenarnya eksis. Jadi sebenarnya semuanya berpulang pada insentif disinsentif.

HB:

Baik. Saudara, anda masih bersama saya, Hamid Basyaib, dalam Forum Freedom dan kita akan beristirahat sebentar. Dan akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.

HB:

Selamat pagi kembali, saudara-saudara. Anda masih bersama saya, Hamid Basyaib. Kita masih dalam acara Forum Freedom. Tamu kita masih yang tadi, yakni Dr. Chatib Basri. Direktur LPEM UI.

Tadi dia sudah berbicara tentang cara mengatasi korupsi. Dia menawarkan 2 cara besar. Satu, adalah law enforcement, buat sistem dan institusi. Kedua, rantai aturan diputus atau diminimumkan. Ini cara yang masuk akal sekali, dan saya kira ini banyak terjadi di banyak negara.

Pertanyaan saya, mengapa resep yang begitu gamblang itu sekarang ini kok tidak

kunjung dilakukan. Apakah ini karena adanya direct-interest dari para pengambil keputusan di pemerintah.

CB:

Saya kembali ke tema kita pagi ini, yakni insentif dan disinsentif, karena saya percaya bahwa banyak hal bisa dijelaskan oleh hal itu.

Kalau sebuah program anti korupsi tidak jalan, maka penjelasan sederhananya adalah bahwa insentif untuk melakukan hal itu lebih kecil dibanding disinsentifnya.

Insentif untuk menghilangkan korupsi itu apa saja? Birokrasi jadi lebih efisien, negara jadi lebih baik. Apakah itu dampaknya langsung terhadap kita? Tidak.

HB:

Tidak, ya. Itu abstrak.

CB:

Itu dampaknya jangka panjang. Sementara disinsentifnya mungkin penghasilan anda menjadi kurang.

HB:

Disinsentifnya langsung, ya.

CB:

Ya, langsung. Karena tadinya anda pungut, sekarang anda kehilangan. Itu yang membuat insentif untuk memberantas korupsi selalu terputus. Jadi penjelasannya sederhana.

Nah, bagaimana kita mengatasi ini. Penjelasannya kembali pada konsep ekonomi. Kompensasi. Anda harus memberikan kompensasi agar insentif untuk melakukan program anti korupsi lebih besar dibanding disinsentifnya. Misalnya dengan menaikkan gaji. Atau promosi. Ini harus dilakukan sekaligus.

Persoalan dengan reformasi anti korupsi adalah bahwa anda tidak bisa hanya menangkap semua orang. Jika pendapatan semua orang hilang, dia takut korupsi tapi pekerjaannya juga tidak akan dijalankan. Dia akan slow down. Ini sudah terjadi di banyak tempat.

HB:

Artinya kerjanya sengaja dilambat-lambatin.

CB:

Ya. Saya ambil contoh mengenai anggaran. Dulu itu prosesnya cepat sekali.

HB:

Dulu itu maksudnya sebelum reformasi, zaman Orba.

CB:

Ya. Kalau pemerintah mau mengeluarkan anggaran itu gampang sekali karena mereka dapat imbalan. Saya tidak tahu, 10%, 20% atau 30%. Sehingga ada insentif orang untuk mengeluarkan anggaran dengan cepat.

HB:

Karena dia juga dapat.

CB:

Ya. Cost-nya tidak ada karena anda tidak diperiksa apa-apa.

Sekarang, kick-backnya tidak ada, atau anda takut ambil. Anda harus bertemu dengan BPK dsb. Ongkosnya besar. Jadi buat apa anda mempercepat keluarnya anggaran.

HB:

Lebih baik ditahan, ya.

CB:

Lebih baik di tahan. Atau kalau perlu dia tidak perlu jadi pimpro. Dia lebih baik *resign*. Demikian juga dengan program anti-korupsi. Anda bicara tentang idealisme tapi itu hasilnya tidak langsung.

Ini yang sering tidak kita pahami, Bung Hamid. Jadi isu insentif dan disinsentif ada inti dari semua masalah.

HB:

Sederhana dan ampuh untuk menjelaskan ini semua.

CB:

Betul.

HB:

Tapi ada masalah tidak kalau anda bilang bahwa kompensasinya adalah kenaikan gaji. Pegawai negeri kan kenyataannya gajinya sudah jauh lebih besar. Di level dirjen dan menteri, mereka bahkan punya fasilitas-fasilitas non-bujeter. Dulu istilahnya dana taktis yang tidak usah dipertanggungjawabkan. Namun toh mereka juga masih korupsi. Jangan-jangan sebabnya bukan rendahnya gaji.

CB:

Kenapa dana taktis itu, misalnya ada, kenapa tidak diformalkan saja sehingga semua orang tahu. Kenapa terjadi korupsi, karena itu tadi, semuanya dilakukan secara tidak transparan. Sehingga orang sering cari-cari untuk korupsi. Saya tidak tahu apakah pendapatan mereka yang besar itu separuhnya legal atau tidak legal.

Itu satu. Kemudian yang kedua, proses remonrasi ini harus dibarengi dengan peran negara dalam membuat peraturan yang harus diperkecil. Kalau anda hanya memberi uang, tapi anda masih memiliki kekuasaan yang bisa anda mainkan, pasti anda korup juga. Karena apa alasannya anda tidak korup. Kesempatannya ada, uangnya besar dan bisa lebih besar.

HB:

Kalau merasa bersalah tinggal umroh. Pulang sudah suci lagi.

CB:

Bagini, kalau mekanisme itu tidak dilakukan, akan susah sekali. Jangan anda harap manusia menjadi malaikat. Kalau insentif untuk menjadi korup besar, triliyunan, maka dibutuhkan iman triliyunan juga untuk tidak menjadi korup.

HB:

Ada soal lain, Bung Dede. Majalah *the Economist* mengatakan bahwa korupsi itu bagian integral dari sistem ekonomi sebuah negara yang normal. Sehingga kalau itu dihilangkan, sistem ekonomi negara kita ini menjadi abnormal. Jangan-jangan para pengambil keputusan itu berpikinya seperti ini. Bagaimana tanggapan anda tentang hal ini.

CB:

Saya kira ada benarnya juga. Kalau anda melihat Singapura, itu dia legalkan semuanya sehingga gaji pegawai negerinya sangat tinggi. Dan buat orang, yang penting sebenarnya adalah kepastian.

Kalau anda deal dengan satu bentuk kebijakan, anda tahu anda harus bayar sekian, tapi kalau anda bayar sekian anda tahu akan beres.

HB:

Pasti akan lebih senang.

CB:

Itu beres. Persoalannya adalah anda mau membeli TV, tapi anda masih menebak-nebak berapa harganya.

HB:

Masih tebak-tebakan, ya.

CB:

Anda menebak 200 ribu. 200 ribu anda kasih, TV-nya masih belum dapat.

HB:

Tambah 100 ribu masih belum dapat.

CB:

Kasih 1 juta, jangan-jangan kemahalan. Ini yang kemudian membuat proses itu sulit.

Nah, yang mau saya katakan, kalau ini mau dilakukan, legalkan saja. Tidak ada

yang salah dengan hal itu. Ini remunerasi. Dalam kasus Singapura itu dilegalkan.

HB:

Gaji PM-nya 10 kali lipat gaji Presiden Amerika, ya. Apa tidak ada yang salah dengan hal ini.

CB:

Saya melihat, jika sesuatu bisa dijalankan dengan baik, apa yang salah dengan hal itu. Kalau Deng dulu bilang: anda tidak peduli punya kucing hitam atau putih yang penting bisa menangkap tikus.

HB:

Ada tidak studi yang meneliti sampai sejauh mana remunerasi atau gaji itu ditingkatkan.

CB:

Yang paling penting adalah benchmark-nya tidak terlalu jauh dengan harga pasar.

HB:

Maksudnya?

CB:

Maksudnya pada level swasta itu seperti apa. Untuk jabatan itu biasanya di swasta itu berapa.

HB:

Jangan terlalu jauh.

CB:

Jangan terlalu jauh. Itu yang membuat insentif orang untuk melakukan korupsi jadi lebih kecil.

Hal lain Bung Hamid, sedikit sekali orang dari Universitas terbaik sekarang ini

mau menjadi pegawai negeri karena insentifnya tidak ada. Remonrasinya kecil. Akibatnya, mereka yang bukan terbaik mengambil posisi prnting dalam pegawai negeri. Nah, orang-orang seperti ini yang kemudian berhadapan dengan orang-orang terbaik dari dunia usaha. Anda bisa bayangkan, keputusannya dibuat oleh orang-orang yang bukan nomor satu. Sistem itu yang akan terjadi.

HB:

Maksud anda, tentu akan kalah terus.

CB:

Kalah terus. Akan diakali. Disogok. Kalau anda pintar, menyogoknya juga akan semakin canggih.

Jadi tidak bisa kita hanya bilang pegawai negerinya korup. Dari pihak swasta kalau tidak ada insentifnya juga tidak akan melakukan itu. Bagi orang bisnis, tidak ada bedanya bayar pajak dengan bayar suap.

HB:

Bagi mereka itu sama dengan ongkos produksi, ya.

CB:

Ongkos produksi. Selama biayanya lebih kecil dibanding manfaatnya, ya jalan saja.

HB:

Tinggal dimasukkan dalam struktur biaya saja, ya.

CB:

Betul. Mereka akan komplain kalau korupsinya lebih besar dibanding uang yang mereka peroleh.

HB:

Jadi sebenarnya tidak ada isu moral.

Terakhir, jadi anda tidak setuju bahwa seperti kata Bung Hatta, ini adalah budaya

korupsi.

CB:

Dalam hal itu saya beda dengan Bung Hatta. Jadi rasional saja.

HB:

Terima kasih sekali, Bung Dede. Sayang waktunya habis. Terima kasih atas kehadiran anda di studio. Saudara-saudara begitulah akhir Forum Freedom minggu ini. Anda bisa berkomentar ke 021-70497497. Saya Hamid Basyaib mohon diri, kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalam.